

VARIABEL TEKNIS SAMPAI DENGAN 12 NOVEMBER 2015

Urusan Diklat

jumlah jabatan tinggi pratama lingkup provinsi	<input type="text"/>
Jumlah jabatan Administrator lingkup provinsi	<input type="text"/>
Jumlah jabatan pengawas lingkup provinsi	<input type="text"/>
Jumlah Pegawai provinsi	<input type="text"/>
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu	<input type="text"/>

Urusan Dukcapil

Jumlah kabupaten/kota	<input type="text"/>
Jumlah SKPD/Lembaga yang memanfaatkan database kependudukan dan dokumen kependudukan Skala Provinsi	<input type="text"/>
Jumlah Penyajian database kependudukan Skala Provinsi	<input type="text"/>

Urusan ESDM

Total luas cekungan air tanah (Hektar)	<input type="text"/>
Jumlah izin pemanfaatan air tanah	<input type="text"/>
Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan total dibandingkan Luas Wilayah Administrasi Daerah	<input type="text"/>
Jumlah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara	<input type="text"/>
Jumlah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri	<input type="text"/>
Jumlah izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat	<input type="text"/>
Jumlah izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama	<input type="text"/>
Jumlah izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi	<input type="text"/>
jumlah izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi yang diterbitkan	<input type="text"/>
jumlah desa belum teraliri listrik	<input type="text"/>

Urusan Informatika

Jumlah saluran komunikasi/ media (media cetak, elektronik, website, media sosial, dll) milik Pemda Provinsi yang dimanfaatkan untuk mendiseminasikan informasi public	<input type="text"/>
Jumlah rata-rata permohonan informasi publik pertahun dalam lima tahun terakhir	<input type="text"/>
Jumlah Saluran Komunikasi/ Media (media cetak, elektronik, website, media sosial, dll) milik swasta yang berbadan hukum/ terdaftar di lingkup Provinsi	<input type="text"/>
Jumlah domain dan Sub Domain lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi yang menggunakan sistem elektronik	<input type="text"/>

Jumlah OPD yang memerlukan infrastruktur Data Center, Disaster Recovery Center & Keamanan Informasi e-Government.

Jumlah aplikasi e-Government.

Jumlah relasi Sistem Elektronik dengan pihak Instansi Lain dan non pemerintah.

Jumlah Pejabat/aparatur negara yang menggunakan layanan e-Government.

Luas (Km2) cakupan jaringan kabel dan nir-kabel TIK yang dikelola bagi pelayanan publik dan Pemerintahan.

Urusan Inspektorat

Luas wilayah

Jumlah APBD

Jumlah penduduk

Jumlah SKPD

Urusan Kearsipan

Jumlah OPD Provinsi dan BUMD Provinsi yang dibina

Jumlah rata-rata boks arsip yang harus dikelola per tahun dalam lima tahun terakhir

Jumlah Perusahaan Swasta dan Organisasi Kemasyarakatan yang dibina

Urusan Kebudayaan

Jumlah organisasi penghayat tingkat provinsi

Jumlah tradisi yang didokumentasikan yang masyarakat penganutnya lebih dari satu kabupaten/kota

Jumlah seni yang pelakunya lintas kabupaten/kota dalam daerah Provinsi.

Jumlah sejarah lokal provinsi

Jumlah museum yang dikelola pemerintah provinsi

Jumlah cagar budaya atau yang diduga cagar budaya peringkat provinsi

Jumlah lembaga adat yang penganutnya lintas kabupaten/kota dalam daerah Provinsi.

Urusan Kehutanan

Luas kawasan hutan Produksi dan Hutan Lindung (ha)

Luas lahan kritis (Ha)

Jumlah Kesatuan Wilayah Pengelolaan Hutan (unit)

Jumlah kelompok masyarakat/tani hutan yang dibina dan diberdayakan (LMDH, Gapoktan, Koperasi, dll)

Urusan Kelautan dan Perikanan

Luas kawasan pemanfaatan umum untuk izin lokasi dan/atau izin pengelolaan WP3K

Jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan

Jumlah unit usaha pengolahan ikan (UPI) yang terdaftar

Jumlah usaha budidaya ikan

Jumlah pelabuhan perikanan berdasarkan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan menteri

Luas ruang laut sebagai kawasan konservasi dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT)

Luas ruang laut sebagai kawasan pemanfaatan umum dan alur laut

Jumlah masyarakat pulau-pulau kecil yang diberdayakan

Jumlah kapal diatas 5 GT sampai dengan 30 GT

Jumlah unit usaha pemasaran ikan yang terdaftar

Jumlah pelabuhan perikanan yang terbangun

Urusan Kepegawaian

Jumlah kebutuhan pegawai

Jumlah pegawai

Jumlah jabatan Tinggi Pratama

Jumlah SKPD

Jumlah jabatan Administrator

Jumlah jabatan Pengawas

Jumlah Pemangku jabatan Fungsional Tertentu

Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Jumlah pemuda kader provinsi

Jumlah organisasi kepemudaan tingkat provinsi

Jumlah kejuaraan tetap tingkat provinsi

Jumlah kejuaraan tetap olahraga nasional

Jumlah organisasi olahraga tingkat Daerah provinsi

Jumlah organisasi kepramukaan tingkat Daerah provinsi.

Jumlah pemuda pelopor provinsi

Jumlah wirausaha muda provinsi

Jumlah kejuaraan olah raga pelajar tingkat provinsi

Urusan Kesehatan

Jumlah Penduduk

Kepadatan penduduk

Urusan Keuangan

Jumlah Barang Milik Daerah

Jumlah Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah

Jumlah Pengguna Barang Milik Daerah

Jumlah Wajib Pajak Daerah

Jumlah Objek Pajak

Jumlah UPT yang melaksanakan pemungutan pajak

Jumlah Kuasa Pengguna Anggaran

Jumlah Pengguna Anggaran

Urusan Lingkungan Hidup

Jumlah Taman Kehati

Jumlah perusahaan pengumpul dan pengolah Limbah B3

Jumlah TPA/TPS Regional

Jumlah Dokumen Lingkungan yang dinilai (AMDAL; UKL/UPL; SPPL) bagi usaha yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah provinsi

Jumlah objek yang harus dilakukan pemantauan kualitas lingkungan sesuai ketentuan yang dampaknya lintas kabupaten/kota

Urusan Litbang

Jumlah Taman Kehati

Jumlah perusahaan pengumpul dan pengolah Limbah B3

Jumlah TPA/TPS Regional

Jumlah Dokumen Lingkungan yang dinilai (AMDAL; UKL/UPL; SPPL) bagi usaha yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah provinsi

Jumlah objek yang harus dilakukan pemantauan kualitas lingkungan sesuai ketentuan yang dampaknya lintas kabupaten/kota

Urusan Pangan

Jumlah jenis pangan lokal berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH) yang konsumennya lebih dari satu kabupaten/kota.

Jumlah Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi.

jumlah Pelaku Usaha pangan segar asal tumbuhan (PSAT).

Jumlah cadangan pangan berdasarkan rasio jumlah penduduk dalam provinsi (Ton)

jumlah kabupaten/kota rawan pangan.

Urusan Pariwisata

Jumlah usaha pariwisata yang usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi yang memiliki TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata)

Jumlah insan/pengusaha/komunitas yang menghasilkan produk kreatif dari seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi

Jumlah jenis produk ekonomi kreatif yang terdaftar dari seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi

Jumlah daya tarik wisata provinsi, kawasan strategis pariwisata provinsi dan destinasi pariwisata provinsi

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Indeks Pembangunan Gender
- Jumlah organisasi perempuan dan anak di tingkat Daerah provinsi
- Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tingkat Daerah Provinsi
- Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 penduduk usia 18 tahun keatas di tingkat daerah Provinsi
- Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0-18 tahun di tingkat daerah provinsi

Urusan Penanaman Modal

- Jumlah jenis fasilitas/insentif yang diberikan bidang penanaman modal yang diberikan provinsi
- Jumlah rata-rata dokumen perizinan dan non perizinan penanaman modal pertahun yang perizinannya menjadi kewenangan provinsi dalam lima tahun terakhir
- Jumlah jenis potensi investasi yang perizinannya menjadi kewenangan provinsi
- Jumlah rata-rata penyelenggaraan promosi pertahun dalam lima tahun terakhir oleh provinsi

Urusan Pendidikan

- jumlah anak usia pendidikan menengah (SMA, SMK, MA)
- jumlah anak berkebutuhan khusus usia sekolah
- jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus
- jumlah izin pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat
- jumlah bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi

Urusan Pengendalian Penduduk dan KB

- jumlah media yang digunakan untuk pelaksanaan advokasi dan KIE pengendalian penduduk dan KB sesuai dengan kearifan lokal
- Jumlah Keluarga
- Jumlah organisasi masyarakat (mitra kerja) tingkat Provinsi yang terlibat dalam pengelolaan, pelayanan dan pembinaan kesertaan ber- KB
- Jumlah organisasi kemasyarakatan (mitra kerja) tingkat provinsi dalam pembangunan Keluarga melalui pembinaan dan kesejahteraan keluarga

Urusan Perdagangan

- Jumlah distributor dan pengecer pupuk bersubsidi
- Jumlah komoditi ekspor berdasarkan HS 2 Digit yang berasal dari 2 atau lebih daerah kab/kota dalam 1 provinsi
- Jumlah importir terdaftar yang memiliki API
- Jumlah jenis barang ber-SNI yang diawasi
- Jumlah pasar tipe A yang menjadi lokasi pemantauan harga

Jumlah eksportir

Jumlah konsumen usia produktif

Urusan Perencanaan

Jumlah Perangkat Daerah

Jumlah Kab/Kota

Jumlah Komisi DPRD Provinsi

Jumlah kerjasama yang diamanatkan dalam Dokumen Perencanaan

Jumlah K/L yang memberikan program kegiatan kepada daerah

Urusan Perhubungan

Jumlah sarana dan prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi

Jumlah jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

Jumlah Stasiun kelas besar, sedang dan kecil pada jaringan jalur kereta api Provinsi

Jumlah penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan pada jaringan jalur perkeretaapian provinsi

Jumlah Persetujuan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Jalan Provinsi

Jumlah trayek pada kawasan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi

Jumlah kebutuhan angkutan tidak dalam trayek pada kawasan perkotaan besar yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi

Panjang jalan provinsi

Jumlah terminal tipe B

Jumlah rata-rata pertahun Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Jalan Provinsi dalam lima tahun terakhir

Jumlah unit angkutan umum orang/barang antar kota dalam provinsi (unit)

Jumlah trayek perdesaan yang melampaui batas 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi

Jumlah angkutan umum yang beroperasi lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi

Jumlah kendaraan taxi yang beroperasi lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi

Jumlah badan usaha angkutan laut, pelayaran rakyat dan angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau yang beroperasi pada pelabuhan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi

Jumlah armada angkutan laut, pelayaran rakyat dan angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau yang beroperasi pada pelabuhan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi

Jumlah trayek angkutan laut, pelayaran rakyat, angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau pada pelabuhan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi

Jumlah usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas.

Jumlah pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi yang dikelola pemerintah

Jumlah pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi yang dikelola swasta

Jumlah pelabuhan pengumpan regional yang dikelola pemerintah

Jumlah pelabuhan pengumpan regional yang dikelola swasta

Jumlah badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional

Urusan Perindustrian

Jumlah industri Besar

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jumlah desa-desa adat di dalam provinsi

Jumlah kerja sama antar-desa dari Daerah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

Jumlah lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa tingkat Daerah provinsi

Jumlah kesatuan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas Daerah kabupaten/kota.

Urusan Perpustakaan

Jumlah Pemustaka (per bulan)

Jumlah Koleksi (judul)

Jumlah Perpustakaan Yang Seharusnya Dibina (Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dan Perpustakaan Khusus)

Jumlah Koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) yang diterbitkan Daerah Provinsi.

Jumlah Katalog Induk Daerah (Entry)

Jumlah Koleksi Budaya Etnis Daerah Provinsi (Judul)

Jumlah Naskah Kuno yang Dilestarikan (Judul)

Jumlah Bibliografi Daerah (Entry)

jumlah promosi gemar membaca (dalam 1 tahun)

Urusan Persandian

Jumlah jenis informasi di tingkat Provinsi yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan

Jumlah konten informasi dari setiap jenis informasi yang wajib diamankan dengan persandian

Jumlah aset/fasilitas/instalasi kritis/vital/penting di tingkat Provinsi yang harus diamankan

Jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per bulan di tingkat Provinsi

Jumlah SKPD di tingkat Provinsi yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan

Urusan Pertanahan

- Jumlah rata-rata izin lokasi lintas kabupaten/kota yang diterbitkan pertahun dalam lima tahun terakhir yang terdaftar
- Luas lokasi rencana pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan rencana tata ruang provinsi (Ha)
- Jumlah subjek hak ulayat yang terletak pada lebih dari satu kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
- Prosentase luasan kesesuaian penggunaan tanah berdasarkan neraca penggunaan tanah mengacu pada rencana tata ruang wilayah provinsi

Urusan Pertanian

- Jumlah distributor pupuk, pestisida dan alsintan
- Jumlah rata pertahun benih tanaman yang tersertifikasi dan beredar (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) (Ton)
- jumlah rumpun/galur ternak (rumpun/galur) yang terdapat pada lebih dari satu kabupaten/kota
- jumlah unit usaha benih ternak, pakan, HPT dan obat hewan (unit usaha)
- Jumlah produksi tanaman pakan ternak (ton pertahun)
- Jumlah pakan yang beredar (ton pertahun)
- jenis sediaan obat hewan yang didistribusikan/beredar (jenis sediaan obat)
- Jumlah benih/bibit ternak yang tersedia dan beredar (satuan ternak)
- Luas areal tanam hijauan pakan ternak (luas areal hektar)
- Jumlah benih/bibit ternak yang tersedia (dosis/embrio/ekor)
- Jumlah jenis benih/bibit hijauan pakan ternak (HPT) (jenis benih/bibit HPT)
- Luas lahan pertanian (Tanaman pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan) (hektar)
- Luas lahan pertanian (hektar)
- jumlah lokasi sumber bibit ternak asli/lokal (lokasi)
- Populasi hewan (jumlah ternak, hewan kesayangan, hewan liar) (ekor)
- Jumlah rekomendasi teknis pemasukan, pengeluaran hewan dan produk hewan (rekomendasi)
- Jumlah permohonan unit usaha peternakan bebas penyakit menular (sertifikat)
- Jumlah unit usaha produk Hewan (unit Usaha)
- Unit usaha hewan dan produk hewan (unit USaha)
- Luas rata-rata pertahun serangan Organisme Pengganggu Tanaman secara bersamaan pada lebih dari satu kabupaten/kota (OPT) (ha) (%)
- Luas areal pertanian yang terkena bencana yang dapat diselamatkan (%)
- Jumlah ternak yang terkena bencana (%)
- Jumlah izin usaha pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan) (ijin)
- jumlah izin pembangunan laboratorium (ijin)
- Jumlah distributor obat hewan (distributor)
- jumlah pelaku usaha perbenihan dan pembibitan ternak (pelaku usaha)
- Jumlah sarana unit pemasaran dan pengolahan hasil pertanian (Peternakan,

Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan) (unit)

Jumlah kasus yang terjadi (%)

Urusan Perumahan dan Permukiman

Jumlah total luas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha

Luas total kawasan permukiman

Jumlah rata-rata sertifikasi dan registrasi bagi perencana perumahan dan permukiman dengan kemampuan menengah dalam satu tahun selama lima tahun terakhir

Indeks resiko bencana provinsi

Jumlah jenis potensi bencana provinsi

Jumlah rumah yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan rencana tata ruang

Urusan Satpol PP

Jumlah wilayah sasaran patroli Pol PP Provinsi

jumlah aset statis pemda provinsi yang menjadi sasaran pengamanan Pol PP Provinsi

Jumlah rata-rata per tahun kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta tamu-tamu penting kedinasan lain dalam kategori VIP/VVIP dalam lima tahun terakhir

Jumlah seluruh Peraturan Daerah Provinsi yang mempunyai sanksi baik pidana maupun administrasi

Jumlah Seluruh Peraturan Gubernur

Urusan PU dan Penataan Ruang

Panjang drainase yang terhubung dengan sungai yang menjadi kewenangan provinsi (km)

jumlah tenaga ahli konstruksi yang dilatih pertahun dalam lima tahun terakhir (orang)

Jumlah permukiman pada kawasan strategis daerah provinsi

Panjang garis pantai pada wilayah sungai kewenangan provinsi yang berisiko abrasi terhadap sarana dan prasarana publik (Km)

Total Luas daerah irigasi teknis yang luas masing-masing daerah irigasinya antara 1000-3000 hektar (Satuan:Ha)

Jumlah desa rawan air yang dilayani dengan sumber air baku dan jaringannya lintas kabupaten/kota

Jumlah fasilitas pengelolaan air limbah pada sistem pengelolaan limbah regional

Luas Cakupan layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) pada sistem pengelolaan limbah regional (Ha)

Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan berfungsi strategis daerah provinsi

Luas kawasan pemukiman di kawasan strategis daerah provinsi (Ha)

Panjang jalan yang menjadi kewenangan provinsi sesuai SK Gubernur tentang status jalan (Km)

Panjang sungai lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi

Jumlah waduk, embong, situ, dan tampungan air lainnya yang merupakan satu

kesatuan sistem dengan sungai lintas kabupaten/kota

Jumlah kawasan strategis provinsi berdasarkan RTRW Provinsi

Jumlah kabupaten/kota

Urusan Setda

Jumlah kebijakan daerah

Jumlah Penduduk

Luas wilayah

Jumlah APBD

Jumlah pegawai ASN Provinsi

Urusan Setwan

Jumlah Anggota DPRD

Jumlah Fraksi DPRD

Jumlah APBD

Jumlah Penduduk

Luas wilayah

Urusan Sosial

Jumlah Keluarga Miskin

Rata rata jumlah ijin pengumpulan sumbangan lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang diterbitkan dalam 5 tahun

Rata-rata pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah provinsi yang dipulangkan ke daerah kab/kota asal dalam 5 (lima) tahun.

Jumlah PMKS yang di rehabilitasi dalam panti.

Jumlah pengajuan adopsi pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal rata rata dalam 5 tahun terakhir

Jumlah penduduk yang tinggal dikawasan rawan bencana yang berpotensi sebagai bencana provinsi

Urusan Statistik

Jumlah survey bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS

Jumlah kompilasi produk administrasi bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS.

Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Linmas

Indeks resiko kebakaran provinsi

Indeks risiko bencana provinsi

Jumlah Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran kabupaten/kota dalam wilayah provinsi

Jumlah jenis potensi bencana di wilayah provinsi

Urusan Tenaga Kerja

Jumlah angkatan kerja dalam daerah provinsi

Jumlah perusahaan menengah

Jumlah perusahaan mikro/kecil

Jumlah Perusahaan besar

Urusan Transmigrasi

Luasan (Ha) pencadangan tanah yang sudah ditetapkan untuk kawasan transmigrasi yang lokasinya terletak di dua kabupaten atau lebih berdasarkan RKT

Jumlah Kepala Keluarga masyarakat transmigran (transmigran dan masyarakat sekitar) yang akan ditempatkan berasal dari lintas daerah Kab/Kota dalam 1 daerah provinsi berdasarkan RKT

Luas lahan dalam satuan pemukiman pada tahapan pemantapan. (T2 s.d T4)

luasan (Ha) pencadangan kawasan dalam RKT lintas daerah Kab/Kota dalam 1 daerah provinsi, tidak termasuk kawasan transmigrasi yang sudah dibangun (RKT idle)

Urusan UMKM

Jumlah usaha simpan pinjam untuk usaha simpan pinjam dan koperasi simpan pinjam dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

Jumlah kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas untuk koperasi simpan pinjam dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

Jumlah koperasi yang wilayah keanggotannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

Jumlah pelaku usaha kecil

Jumlah pengurus koperasi yang wilayah keanggotannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

12 NOVEMBER 2015